

## GLOBALISASI INFORMASI\*

Oleh Ashadi Siregar

- 1 -

Hanya sebuah fiksi. Tetapi film ini, tidak sengaja tentunya, telah menggambarkan dunia informasi. Clark Kent dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa adalah wartawan koran Daily Planet. Sementara dalam kapasitasnya sebagai superman, dia menghadapi antagonis yang menguasai dunia informasi lainnya. Aktivitas si wartawan hanya sekadar menggambarkan pria yang bengang-bengong, dan hasil kerjanya yang muncul di koran tidaklah terlalu penting. (Apakah pernah orang-orang memperhatikan berita yang ditulisnya dalam *Daily Planet*?). Sepak terjang yang sesungguhnya adalah saat dia menjadi Superman yang harus bertarung dengan antagonis yang melakukan aksinya melalui jaringan komputer.

Alkisah Ross adalah seorang pengusaha konglomerat. Dan entah sebagai stereotip film ala Hollywood, maka digambarkanlah Ross yang sangat tamak. Dia tidak puas hanya berusaha dengan hukum-hukum ekonomi yang konvensional. Di antara karyawan, Gus seorang programer eksentrik tetapi kreatif, dan saking kreatifnya dapat merekayasa program untuk memindahkan sejumlah data keuangan kelebihan pecahan gaji karyawan berupa angka mengambang dalam sistem perbankan konglomerat, ke dalam data gajinya.

Kendati mengetahui kejahatan kerah putih ala Gus, sang konglomerat tidak menindaknya, tetapi memanfaatkan kejenial-an si progamer. Ross memerintahkan agar Gus merekayasa program jaringan komputer, kalau perlu menyusup ke dalam jaringan komputer yang dikuasai pihak lain, dan kemudian menggunakan data berbagai variabel yang dapat menguntungkan perusahaannya. Di antaranya adalah dengan merekayasa informasi/data satelit cuaca, sehingga membuat musim "salah mongso" yang merusak pertanian kopi di Amerika Selatan. Berikutnya mengubah informasi dalam jaringan bisnis perminyakan, dengan memberikan instruksi yang mengganggu suplai bahan bakar ke antar dunia. Krisis terjadi, saat pom bensin tidak dapat melayani konsumen. Dan puncaknya, saat si konglomerat menciptakan superkomputer dengan kecerdasan buatan yang dirancang mampu bertempur (*Superman III*, Produser: Alexander Salkind).

Begitulah film ini menggambarkan ada ada dua dunia informasi, pertama informasi yang dicetak dalam Daily Planet dapat dimanfaatkan secara terbuka, hasil kerja manusia bengong Clark dan teman seprofesinya. Kedua, informasi yang mengisi jaringan komputer, biasa disebut sebagai data, yang dapat menggerakkan arus komoditas dan uang, bahkan sangat sensasional dapat mengubah cuaca dan kalau perlu menggantikan Angkatan Perang.

Suratkabar Daily Planet tidak pernah mengubah kehidup-an. Tetapi informasi berupa data dalam jaringan komputer, dapat mengubah nasib programer komputer perekayasa data yang miskin, untuk tiba-tiba menjadi jutawan; atau membuat pasok-an dan permintaan komoditas menjadi kacau. Dan hanya makhluk super dari planet Krypton yang mampu menanggulangi sang penguasa data dalam jaringan komputer ini.

Tentunya tidak dimaksudkan sebagai referensi kajian Ilmu Sosial. Namun film ini boleh dijadikan pengingat bahwa dari sudut informasi dapat pula dilihat pemilahan kenyataan sosial. Betapa kehidupan umat manusia dapat dipilahkah secara tajam antara kenyataan keras (*hard reality*) dan kenyataan lunak (*soft reality*). Kenyataan keras adalah kehidupan bersifat empiris dalam interaksi manusia, bersifat fisik dan materil. Sedangkan kenyataan lunak adalah kehidupan dalam alam pikiran, penghayatan simbol dan nilai-nilai.

---

\* Esai disampaikan pada Seminar Memperingati Sepuluh Windu Prof. Dr. Selo Sumardjan "Masyarakat Indonesia Memasuki Abad ke-21", Yayasan Ilmu Ilmu Sosial, Yogyakarta 17 - 18 Juli 1995

Di dalam masing-masing dunia ini berlangsung kegiatan komunikasi, pemanfaatan informasi. Informasi dalam kenyataan keras memiliki nilai pragmatis tinggi, bernilai guna yang langsung terpakai dalam kehidupan sosial yang bersifat empiris. Dengan kiasan ini pula ingin saya sebut sebagai in-formasi keras. Informasi semacam inilah yang dioleh oleh Gus, berupa data cuaca, komoditas dan uang yang menjadi in-formasi dalam jaringan komputer konglomerat Ross. Sementara informasi dari dan untuk kenyataan lunak pada dasarnya hanya bernilai bagi alam pikiran, lebih jauh dari sisi jagat (*domain*) psikologis. Untuk mudahnya dikiaskan sebagai informasi lunak, yang tercetak dalam suratkabar Daily Planet, yang menjadi sampiran bagi sang superman.

Kenyataan keras merupakan dunia yang tidak terelakkan, dijalani manusia baik secara institusional maupun individual. Sebaliknya manusia dapat mengabaikan kenyataan lunak, sebab dunia semacam ini hanya relevan saat kehidupan ingin diberi lebih bermakna. Makna ini dapat dikonotasikan dalam nilai sosial atau transendental. Kedua kenyataan ini dapat diilustrasikan dengan kemustian manusia lapar yang perlu makan, dengan manusia yang makan di restoran elegan untuk pergaulan sosial. Keniscayaan lapar dan kepantasannya dalam pergaulan, merupakan dua kehidupan harus dianggap tidak terpisah, namun boleh dipilah.

- 2 -

Selain pemilahan dari kenyataan sosial yang mendasari-nya, dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dapat dibedakan dari sisi jaringan komputer. Di satu pihak adalah informasi yang tersedia pada jaringan komputer, baik yang bersifat sistem tertutup, semi terbuka, maupun terbuka. Pada pihak lain informasi yang berada di luar jaringan komputer, melalui media interpersonal dan media massa konvensional. Sistem komunikasi jaringan komputer satu ketika mungkin akan disebut sebagai komunikasi konvensional, sedang komunikasi media massa betapa pun pernah dianggap modern akan disebut tradisional.

Dengan pemilahan ini penggunaan piranti komunikasi ditandai dengan tingkat pengaksesan yang dimungkinkan, serta relevansi informasi dengan kenyataan keras penggunanya. Dari sini secara sederhana dapat ditawarkan cara melihat kehidupan sosial, yakni dari semakin terbatasnya pengaksesan atas informasi keras, dan lebih lanjut lebih banyak pengaksesan atas informasi lunak. Dengan demikian kegiatan komunikasi dapat dilihat sebagai indikator dari kehidupan sosial. Untuk itu indikator tidak hanya sebatas jumlah perangkat media massa (media cetak, film dan rekording dan broadcasting) yang digunakan dalam masyarakat.

Begitulah, dari kelompok besar pertama, informasi dalam jaringan komputer, dapat dilihat atas 3 jenis. Pertama adalah informasi yang bermakna sebagai komoditas dan uang, dalam sistem pasokan dan pengambilan, dan sepenuhnya bersifat tertutup dalam sistem transaksi ekonomi institusional dan individual. Sistem ini sepenuhnya bersifat internal, berada dalam interaksi on-line intra korporasi atau birokrasi, maupun antar korporasi dan birokrasi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan massa.

Kedua, adalah jenis sistem yang memberi peluang bagi individu untuk mengakses informasi yang menyangkut dirinya, seperti data rekening personal dalam perbankan, atau mungkin (kelak) data pribadi dalam sistem pelayanan medis, kependudukan dan lainnya. Sistem ini mulai dari bersifat baca saja, memindah fungsi data (debit-kredit), sampai meminta pelayanan informasional.

Jenis ketiga, data yang berlangsung dalam sistem sosial baru yang dibangun melalui jaringan komputer. Individu dapat mengakses data/informasi dengan persyaratan keanggotaan yang lebih longgar. Sistem ini mulai dari baca saja, ambil saja, kirim saja, sampai ambil dan taruh data.

Sementara untuk kelompok besar kedua, informasi di luar jaringan komputer yakni melalui media konvensional (massa dan interpersonal) selama ini dilihat dengan menggunakan model-model pemikiran tradisional dalam Ilmu Komunikasi khu-susnya dan Ilmu Sosial umumnya. Model ini menjadikan sistem media/pesan sebagai inti (*core*) dan khalayak sebagai periferal, atau sebaliknya khalayak sebagai inti dan media/pesan sebagai periferal.

Agaknya kini perlu pula ditawarkan cara pandang yang lain, yaitu dengan melihat sistem produksi sebagai tumpuan perhatian. Ketika *Sony*, suatu perusahaan perangkat keras membeli *Columbia Pictures* dan *CBS-Records* sehingga menguasai seluruh produk yang telah dan akan diproduksi, selayaknya mengubah cara pandang terhadap media dan pesan. Begitu pula dengan disalurkannya produk-produk sejumlah kantor berita internasional semacam *Reuters*, *AP*, *UPI* dan sebagainya, selain ke media massa konvensional juga ke dalam internet; atau media massa seperti *CNN*, *Time* dan lainnya juga memberi pasokan produk ke dalam internet, dunia informasi perlu dilihat dengan perspektif baru.

Posisi media massa konvensional semakin bersifat sebagai penyalur, semakin kecil peran sebagai produsen. Katakanlah media televisi (*tv-broadcasting*), makin lama makin sedikit memproduksi sendiri program. Pada dasarnya posisi suatu stasiun televisi adalah pemrogram atas dasar kecende-rungan lokalitas khalayak, sementara program-programnya ber-asal dari produsen. Karenanya yang bersaing pada dasarnya bukanlah stasiun televisi, tetapi produsen.

Seluruh sistem operasi komunikasi kini boleh dikata semakin bertumpu kepada kemajuan teknologi perangkat keras telekomunikasi dan komputer. Setelah komputer generasi ke-4 yang dikenal sebagai personal computer (PC) dipasarkan kepada masyarakat pada tahun 1980-an, kemajuan komputer tidak hanya pada sofistikasi teknologi fisik internalnya, tetapi yang tidak kalah adalah dampaknya berupa massifikasi dalam produksi dan distribusinya. Sementara teknologi perangkat lunak (teknik untuk menggunakan informasi/data) geraknya ditandai untuk menjadikan informasi dalam jaringan komputer semakin terbuka dan mudah digunakan. Kendati ada penyimpangan (seperti hacker yang merusak data, ataupun informasi "merusak" moral konvensional), teknologi perangkat lunak bertambah maju untuk menjadikan informasi dari jaringan komputer semakin mudah dan luas digunakan.

Dengan menjadikan sistem jaringan komputer sebagai landasan dalam memandang kenyataan sosial, maka fenomena komunikasi dapat dilihat sebagai produsen, produk, dan pengguna. Ini membawa konsekuensi, antara lain pertama-tama pengenalan atas kedudukan produsen dalam struktur ekonomi dan politik. Pandangan konvensional menempatkan komunikator atau sumber sebagai titik awal. Sekarang sudah perlu menumpukan perhatian kepada institusi yang menghasilkan produk informasi, yang keberadaannya dalam skala global atau nasional.

Kemudian, kecenderungan komodifikasi produk menjadikan perlu ditumpukan perhatian atas relevansi produk informasi terhadap masyarakat, karakter informasi keras atau lunak, sejauh mana relevansinya dengan kenyataan keras atau lunak. Dan perhatian juga terhadap tingkat aksesibilitas khalayak atas produk informasi, dan informasi macam apa yang digunakan. Gejala sosial dilihat dari tipe produk informasi yang digunakan oleh masyarakat, dan bagaimana tingkat aksesibilitas suatu masyarakat terhadap produk informasi yang diproduksi dan didistribusikan, dan dari produsen mana saja produk informasi itu datangnya. Dengan 3 komponen ini kenyataan masyarakat agaknya dapat dilihat dengan perspektif lain.

- 3 -

Dari aras semacam inilah globalisasi informasi ingin saya bicarakan. Dengan kata lain, perbincangan tentang arus informasi tidak dapat dilepaskan dari kenyataan yang

menyebabkan hadirnya informasi. Membicarakan informasi sebagai suatu jagat tersendiri, dapat saja dilakukan jika menganggap komunikasi semata-mata kegiatan psikologis, atau sebagai pemaknaan domain simbolik. Karenanya arus informasi negara maju yang tidak seimbang, atau tata informasi baru yang diperjuangkan oleh negara sedang berkembang, tidak hanya dilihat sebagai masalah ideologi, atau keinginan politik. Ideologi yang menjadi paradigma dari setiap negara dan bangsa, tentu saja dapat dijadikan titik tolak dalam melihat interaksi berbagai negara dan bangsa. Namun hal yang lebih penting adalah dinamika empiris yang berlangsung dalam interaksi tersebut.

Untuk itu, dengan cara lain, dunia dapat dilihat dalam pilahan antara kegiatan produksi dan konsumsi. Maka kehidupan umat manusia adalah suatu pasar dunia. Produksi yang berlangsung merupakan suatu dunia yang tidak perlu lagi kita ketahui siapa dan dimana adanya. Bagi kekuatan produksi, tidak ada batas negara. Manusia hanya perlu diidentifikasi dari kecenderungan variabel sosiografis dan psikografisnya yang relevan untuk dibangkitkan agar dia bertindak sebagai konsumen.

Dunia produksi semakin intensif dalam memelihara pasar dunia. Berbagai perjanjian internasional pada dasarnya adalah menjadikan dunia sebagai sebuah pasar tanpa batas negara (borderless). Bahkan kekuasaan negara-negara, khususnya negara selatan tidak lagi punya kekuatan untuk menjaga lingkungan negaranya agar tidak dipenetrasi oleh kekuatan produksi asing. Ilustrasi dapat ditunjukkan dari tekanan kekuatan produksi film Amerika Serikat terhadap Indonesia yang dianggap membatasi masuknya komoditas film. Departemen Penerangan RI menempatkan film sebagai produk budaya, karenanya dengan alasan melindungi nilai budaya nasional ditentukan adanya kuota produk film yang boleh diimpor. Tetapi kekuatan produksi film Amerika Serikat menganggap bahwa film sama halnya dengan komoditas ekonomi lainnya. Jika pemerintah Indonesia menetapkan kuota terhadap komoditas film, maka komoditas Indonesia semacam produk konveksi dan kayu lapis, juga harus dikenai kuota pula untuk masuk ke Amerika Serikat. Alangkah ironisnya untuk memadankan film dengan baju dan kayu lapis.

Dengan ungkapan lain, maka dunia saat ini biasa pula dipilah antara negara-negara utara dan selatan. Eufemisme lor dan kidul ini mungkin harus dirumuskan dengan lebih telanjang, sebagai dunia atas yaitu negara-negara yang mampu menguasai pasar dunia, dan dunia bawah adalah negara-negara yang tidak menguasai pasar dunia bahkan mungkin menjadi obyek bagi dunia atas.

Dikhotomi manapun mau dipakai, setidaknya dapat dilihat gejala yang menonjol. Dari dunia atas, tekanan yang datang di antaranya perlindungan hak cipta atas produk, dan pemaksaan agar tidak ada pembatasan diskriminatif atas jumlah produk lintas negara. Secara keseluruhan, paradigma yang digunakan adalah menempatkan produk informasi sebagai komoditas yang bernilai ekonomis.

Pada pihak lain, reaksi dari dunia bawah agaknya dapat dirumuskan antara lain dengan upaya meminta penundaan dari setiap kesepakatan pasar dunia, mulai dari perundingan bilateral berkaitan dengan hak cipta, atau upaya kolektif untuk penundaan kesepakatan pasar global. Dengan kata lain, setiap upaya berupa reaksi bertahan dari tekanan dunia atas. Sementara ke dalam negeri, landasan yang digunakan adalah masih tetap menempatkan informasi sebagai produk ideologi.

- 4 -

Indonesia telah terseret dalam seluruh dinamika kemajuan teknologi komunikasi. Dengan sendirinya seluruh sistem komunikasi dapat ditemukan di sini. Di sekitar kota industri Freeport di pedalaman Irian Jaya yang menggunakan sistem jaringan komputer melalui satelit yang on-line dengan perusahaan induk, cabang dan perusahaan lainnya,

misalnya, terdapat masyarakat asli yang mungkin belum mengenal media massa konvensional.

Apa yang bisa dicatat, dalam kemajuan dan keragaman sistem komunikasi, adalah waktu seolah berhenti di negeri kita. Tidak banyak perubahan cara pandang dibanding dengan yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Dengan kata lain, titik tolak dalam melihat fenomena komunikasi dalam masyarakat tidak banyak beranjak dari masa-masa lebih setengah abad yang lalu.

Pada era kolonial, Belanda dan Jepang, penjajahan yang berlangsung tentunya dilihat dari kekuasaan birokrasi negara dalam mengendalikan seluruh kenyataan keras. Sistem yang menggerakkan kenyataan keras, ekonomi dan politik, sepenuhnya dalam kendali birokrasi negara, dimana perlu menggunakan kekuatan fisik (militer dan polisi). Sistem komunikasi internal yang mendukung kenyataan keras ini, baik yang berlangsung dan digunakan oleh birokrasi negara maupun oleh masyarakat, tentulah masih terbatas. Media massa hampir tidak dikenal. Masyarakat mulai berubah dengan adanya angin baru dalam dunia pendidikan. Yaitu setelah orientasi lembaga pendidikan pada dasarnya untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat menjalankan birokrasi, nampak hasilnya. Dengan politik etis, semakin lama jumlah pribumi yang dapat memasuki birokrasi negara bertambah banyak. Karenanya dapat dipahami mengapa perintis pers nasional menyebut korannya Medan Priyayi, karena memang ditujukan kepada kaum priyayi, lapis penduduk Indonesia yang melek huruf (latin) yang berada dalam birokrasi

Dalam pada itu pengendalian atas kenyataan keras sesungguhnya sangat terbatas. Dunia ekonomi misalnya, yang bertumpu kepada budidaya pertanian, kendati dijalankan oleh onderneming yang ditopang oleh birokrasi negara, pada dasarnya tidak banyak beda teknologinya dari budidaya pertanian masyarakat pribumi. Dengan sistem agrikultur, pengendalian dilakukan langsung terhadap komoditas, tidak melalui data/-informasi komoditas. Pengendalian sebenarnya terbatas, sebab masyarakat pribumi dapat menjalankan dunia ekonominya, kendati dalam tingkat subsistensi, tanpa disentuh oleh kekuasaan birokrasi negara. Komoditas produksi onderneming kolonial berorientasi ekspor, karenanya tidak menyangkut hajat hidup rakyat pribumi. Intruding kekuasaan birokrasi hanya melalui pungutan pajak atas komoditas pertanian rak-yat. Jika tekanan pajak terlalu keras sampai tidak tertanggungkan, rakyat gampang digerakkan oleh pimpinan-pimpinan kharismatis yang dianggap sebagai Ratu Adil.

Secara sederhana pemerintahan penjajahan dapat dilihat sebagai strategi menjaga elastisitas berupa daya tekan dari atas dan daya terima dari bawah yang berkaitan dengan pajak yang ditetapkan. Dan keunggulan seorang birokrat manakala dapat menangkap titik-titik kritis dari elastisitas tersebut. Jika titik elastisitas putus, maka diperlukan manajemen militer untuk menumpas setiap pemberontakan Ratu Adil yang muncul. Manajemen militer adalah pengaturan logistik dan personel yang seimbang dalam gerakan militer, agar tidak hanya berhasil di satu tempat tetapi kecolongan di tempat lain. Karenanya birokrasi sipil yang terbaik adalah yang sewaktu-waktu dapat sekaligus menjalankan manajemen militer.

Pada masa penjajahan Jepang, birokrasi negara tentunya tidak perlu menjaga-jaga elastisitas rakyat. Pertama karena sistem perpajakan tidak sempat dijalankan, dan kedua birokrasi negara sepenuhnya dijalankan dengan manajemen militer. Sistem logistik dilakukan dengan langsung memungut komoditas pertanian rakyat, bahkan kalau perlu memreteli mesin-mesin onderneming. Menjadi pejabat pemerintahan pada masa penjajahan Jepang, tentunya dengan menjalankan birokrasi dengan cara yang primitif, yaitu fisik dan paksaan.

Lebih jauh, bagaimana sebenarnya penjajahan itu? Bahwa birokrasi negara dijalankan oleh orang asing, dengan menjadi bagian dari suatu negara induk. Asing dan pribumi, merupakan pemilahan antara birokrasi negara dan masyarakat. Dikotomi yang sama juga ditunjukkan oleh hukum yang memilah masyarakat. Hukum perdata bagi

penduduk Belanda dan yang dipersamakan di satu pihak, dan hukum adat dan agama bagi penduduk pribumi. Begitu pula pengadilan terpisah untuk perkara pidana bagi pribumi di satu pihak, dan Belanda beserta pen-duduk yang memperoleh forum privelegiatum di pihak lain.

Melalui pengendalian kenyataan keras dan segregasi sosial secara legal, maka penjajahan berlangsung. Secara empiris ada perbedaan yang tajam antara birokrasi negara dengan masyarakat pribumi. Dengan begitu sangat mudah untuk menumbuhkan suatu kenyataan lunak, berupa nilai dan simbol untuk dunia alam pikiran yang menunjukkan perbedaan itu di kalangan pribumi. Karenanya dapat dipahami jika kekuasaan negara juga berusaha mengendalikan kenyataan lunak.

Pengendalian atas kenyataan lunak dilakukan melalui tindakan birokrasi negara terhadap segala bentuk organisasi sosial, dan setiap media yang diselenggarakan oleh dan untuk organisasi sosial tersebut. Organisasi sosial ini bukan hanya badan-badan yang memiliki sifat formal, tetapi setiap kolektivitas yang memiliki acuan atas alam pikiran, nilai dan simbol yang sama. Media antara lain berupa media sosial (forum-forum sosial dengan pemuka pendapat/opinion leader), dan media massa yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara acuan bagi dunia alam pikiran tadi.

Pada puncak tekanan penjajahan, birokrasi negara menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang semakin keras dan telanjang, bahkan ahli hukum Belanda sendiri tidak dapat menerimanya. Di antaranya adalah kekuasaan Gubernur Jenderal untuk menggunakan hak eksorbitan (exorbitante recht), dan pelarangan terbit koran atau yang populer disebut sebagai Persbreidel Ordonnantie. Kedua kewenangan yang bersifat preventif ini banyak mengambil korban para pejuang nasional yang dibuang ke Digul dan daerah-daerah lain, serta koran-koran yang berhenti terbit. Selain itu tindakan represif juga dijalankan pula dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Pidana terutama pasal-pasal yang biasa disebut haatzaai artikelen yang disebut sebagai pasal-pasal "karet", karena sangat longgar dalam penginterpretasiannya. Pembuktian hukum untuk pasal pidana ini tidak melalui pengujian materiel atas perbuatan pelaku maupun efek empirisnya, tetapi melalui ucapan atau tulisan yang diinterpretasikan secara semantis oleh penuntut yang mewakili kekuasaan negara. Penginterpretasian atas dasar kekuasaan negara ini terus-menerus berhadapan dengan upaya membangun otonomi lembaga peradilan di Hindia Belanda.

Tindakan keras dari birokrasi negara menjelang akhir kekuasaan penjajahan Belanda dapat dilihat sebagai implikasi dari konstelasi dunia pada Perang Dunia II dengan menguatnya koalisi blok Axis (Jerman, Italia dan Jepang). Negara-negara fasis yang semakin gencar propagandanya dan semakin kuat kecenderungan ekspansionisnya ke negara-negara lainnya, me-nakutkan orang-orang Belanda yang berada di blok seberangnya. Birokrasi kolonial Hindia Belanda dengan sendirinya sangat kuatir akan ancaman serbuan Jepang.

Atau sebaliknya dapat disebut, penyelenggara birokrasi Hindia Belanda sama sekali tidak memahami konstelasi internasional, sehingga bersamaan itu mengabaikan dinamika yang berlangsung di Indonesia. Dengan kata lain, boleh juga dilihat sebagai ketidak-siapan dalam menghadapi perubahan masyarakat.

Politik etis pertama-tama dimaksudkan untuk memperlakukan masyarakat pribumi lebih manusiawi, di antaranya dengan lebih banyak melibatkannya dalam penyelenggaraan birokrasi negara. Sebagai efek sampingnya, dunia pendidikan telah menghasilkan semakin banyak rakyat pribumi terdidik, sehingga terbentuk suatu komunitas baru, dengan kesadaran kolektivitas tidak hanya domestik, tetapi juga global. Komunitas ini dipelihara oleh forum-forum sosial dan media pers. Dan terhadap forum sosial dan media pers inilah tindakan keras dilakukan oleh birokrasi Hindia Belanda.

Menjelang akhir kekuasaannya, boleh dikata tidak ada gerakan militer lagi, digantikan tindakan kepolisian yang dijalankan oleh dinas intel pengawasan politik (Politieke Inlichtingen Dients). Semakin keras tindakan terhadap organisasi dan media masyarakat, semakin kental dikhotomi antara birokrasi negara dengan masyarakat. Dan puncaknya adalah tatkala penduduk pribumi mengelu-eluh balatentara Jepang yang mara ke Indonesia. Berbagai memoar dan novel yang ditulis orang Belanda atau Indo (peranakan Belanda dan pribumi) setelah PD II, mencerminkan kehancuran hati mereka, karena tidak menyangka penduduk pribumi lebih menyukai tentara fasis.

- 5 -

Tentu saja tidak mungkin dan tidak boleh dipadankan antara sistem kolonial di negara terjajah dengan sistem nasional suatu negara merdeka. Tetapi kenyataan keras pada dasarnya tidak mengenal perbedaan ini. Baik di negara terjajah maupun negara merdeka, selamanya terdapat dinamika ke-nyataan keras yang berlangsung di satu pihak dan birokrasi negara yang berusaha mengendalikannya dari pihak lain. Pengendalian kenyataan keras ini tidak ada kaitannya dengan sifat kolonial atau nasional suatu birokrasi negara. Kenyataan interaksi sosial yang bersifat fisik dan materil memilikinya dinamika hukumnya sendiri. Dinamika interaksi fisik misalnya, bergerak atas dasar kebutuhan manusia, dan birokrasi negara hanya dapat berperan dalam pengawasan. Begitu pula dalam hal materil, berlandaskan hukum pasar, penawaran dan permintaan.

Birokrasi negara dapat menjalankan fungsi maksimal, pada tingkat menggerakkan interaksi sosial. Fungsi birokrasi negara pada dasarnya menyelenggarakan pelayanan untuk masyarakat. Tugas pelayanan oleh birokrasi negara untuk menjaga tertib sosial, ditunjukkan dari rendahnya tingkat kejahatan atau pelanggaran bersifat fisik dan materil. Begitu pula pencapaian materil oleh penduduk, merupakan tugas pelayanan lainnya dari birokrasi negara. Belum lagi dibicarakan pencapaian kultural (kebahagiaan) oleh masyarakat.

Selain yang dijalankan oleh birokrasi negara, untuk mencapai tujuan primer tertib sosial dan kesejahteraan materil itu, masyarakat sesungguhnya memiliki sistemnya sendiri. Pelayanan birokrasi negara adalah memberi jaminan agar sistem ini berjalan secara adil dan efektif. Untuk beberapa kasus, mungkin saja birokrasi negara menjalankan peran aktif, sebagai pelaku yang sama seperti warga masyarakat. Tetapi dalam perkembangan masyarakat terlihat bahwa peran birokrasi negara semakin berkurang. Dengan tuntutan deregulasi dalam berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia, pada dasarnya birokrasi negara diminta untuk menghapus regulasi yang mengendalikan secara sepihak dinamika pasar, dan mengeluarkan regulasi yang menjamin hukum pasar.

Tuntutan yang berasal dari dinamika pasar ini tidak berdiri sendiri. Mengingat dunia ekonomi adalah yang langsung berada dalam kenyataan keras dari proses globalisasi, tidak heran jagad ekonomi domestik Indonesia tidak tertahan untuk harus menyesuaikan diri di dalamnya. Hal ini agaknya mengingatkan akan perlunya aparat departemen politik Pemerintah Indonesia memperhatikan perubahan-perubahan konstelasi, konsekuensi dari pola hubungan antar negara yang berbasiskan ekonomi. Hubungan tidak lagi atas dasar politik atau kultural, melainkan berbagai perjanjian internasional yang bersifat ekonomis.

Alasan kultural apalagi politis, ternyata tidak dapat digunakan dalam menghadapi arus komoditas. Arus komoditas yang menuntut dunia yang bersifat borderless, merupakan kenyataan empiris yang selalu disebut-sebut sebagai gejala globalisasi. Ini merupakan kenyataan keras, sementara dunia informasi merupakan kenyataan lainnya.

Di dalam kenyataan keras ini, ada proses informasi yang bersifat langsung, yang menjadikan seluruh mekanisme supply and demand berlangsung. Ini dapat melalui jaringan komputer, dan segala media yang digunakan dalam menyampaikan informasi

pendukung sistem produksi dan distribusi. Informasi semacam ini berada di balik seluruh mekanisme kenyataan keras, tidak gembar-gembor, tetapi sangat menentukan dalam kehidupan modern. Informasi tentang akaun seseorang dalam sistem kartu kredit, transaksi valuta asing, informasi mobilitas komoditas, dan semacamnya yang berlangsung dalam jaringan komputer menjadi dinamika dalam kehidupan masyarakat modern. Semakin lama, sistem informasi dunia produksi ini semakin terbuka bagi konsumen. Ini melalui akses langsung bagi konsumen untuk mengetahui informasi tentang dirinya dalam sistem informasi yang dikuasai oleh dunia produksi.

Informasi melalui media konvensional, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan informasi (data) di balik kenyataan keras dunia produksi. Tetapi uniknya, dia merupakan kegiatan informasi yang paling "bising". Dalam kehiruk-pikukan penyampaian informasi media konvensional adalah langkah untuk menciptakan kenyataan lunak yaitu dunia alam pikiran, dan ini selanjutnya akan menjadi basis yang mendukung kenyataan keras.

Tetapi ada yang dilupakan, yaitu kenyataan keras pada dasarnya tidak hanya berlangsung dari kenyataan lunak. Dengan kata lain, dinamika kenyataan keras memiliki hukum-hukumnya sendiri, tidak semata-mata ditentukan oleh nilai-nilai dan makna simbolik yang bersifat kolektif. Sebagai misalnya, seorang berkebangsaan Indonesia, kendati sangat yakin dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai manajer valas di bank nasional, saat menekan tuts kibor komputernya untuk menginstruksi melepas sekian juta USD ke dalam yen, sulit membayangkan dia masih sempat berpikir dengan Pancasila. Proses beralihnya dollar ke yen, atau rupiah menjadi dollar dan kemudian ngendon di pulau negeri antah berantah, itulah antara lain kenyataan keras.

Sementara kita masih sibuk mengurusi dunia alam pikiran masyarakat, dengan mencurigai setiap hal yang dipikirkan, diomongkan, atau dituliskan melalui berbagai media. Sungguh suatu hal yang kontra-produktif. Dunia informasi yang ada dalam media konvensional ini pada dasarnya hanya refleksi dari kenyataan keras. Sekali lagi merefleksikan, bukan berada di dalamnya. Dalam merefleksikan itu pun hanya sebagian saja yang dapat dibukakan secara luas. (Apakah anda yakin seluruh kenyataan keras akan muncul dalam media konvensional?)

Mungkin media konvensional pada waktu yang lampau dapat mempengaruhi dinamika kenyataan keras. Orang masih percaya kepada kekuatan propaganda, seperti periklanan. Propaganda mungkin dapat mempengaruhi alam pikiran. Informasi dapat menggerakkan kebutuhan menjadi keinginan. Tetapi dalam ke-nyataan keras, bukan hanya keinginan atau kemauan semata, sebab banyak faktor yang mempengaruhi sebelum orang dapat atau mampu bertindak. Begitu pula, sulit membayangkan bahwa informasi lunak akan dapat mengguncangkan sendi kehidupan.

Agaknya nubuat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dapat dipahami dari sini, bahwa Beliau-lah Nabi terakhir penutup zaman, tidak akan ada lagi Nabi. Adapun para Nabi menggunakan informasi untuk mengubah masyarakat. Memang informasi yang disampaikan para Nabi berbeda sifatnya, mengingat asalnya dari Tuhan. Tetapi saat disampaikan, menjadi informasi terbuka yang menggunakan sarana sosial. Penerimaan dan penolakan informasi langit pada dasarnya berdasarkan hukum-hukum dalam interaksi sosial.

Sekarang dunia informasi yang bersifat terbuka, berjalan bersamaan dengan informasi yang memiliki nilai pragmatis dalam kenyataan keras. Tetapi jagad data/informasi yang berada langsung dalam dinamika kenyataan keras, jauh lebih tinggi frekuensi dan nilai gunanya. Data/informasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kenyataan keras proses globalisasi, sama sekali di luar jangkauan kekuasaan negara, apalagi pengkaji Ilmu Sosial. Sementara yang banyak diributkan adalah informasi yang muncul melalui media massa konvensional. Produk informasi semacam ini yang datang bersamaan dengan proses globalisasi, dapat saja menimbulkan kerisauan. Informasi

semacam ini biasanya dikemas untuk memenuhi motif-motif universal, agar dapat dipasarkan secara global.

Boleh jadi penduduk dunia akan menjadi lebih tunggal budaya. Tetapi sebaliknya, mungkin juga masyarakat akan men-cari akar identitasnya yang lebih kongkrit, nilai-nilai pri-mordial atau etnisitas. Jika proses menjadi bangsa-bangsa yang berkewargaan budaya universal, boleh disebut sebagai pengaruh globalisasi. Pada sisi lain, manakala masyarakat di Indonesia malah mencari identitas dan nilai etnisitas yang lebih sempit dari nasionalisme yang dikenal pada pertengahan abad 20, sebagaimana penduduk negara-negara baru di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur, apakah ini sebagai disfungsional informasi global? Siapa yang berani membuat prediksi masya-rakat abad ke 21 di Indonesia?